PENGARUH KETIMPANGAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, GARIS KEMISKINAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DI PULAU SUMATERA

(Skripsi)

Oleh

ABDIRROHMAN

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRACT

THE EFFECT OF ECONOMIC INEQUALITY, OPEN UNEMPLOYMENT RATE, POVERTY LINE AND CRIME CLEARENCE ON CRIMINAL PROPERTY RATE IN SUMATERA

BY

ABDIRROHMAN

This study aims to analyze the effect of economic inequality, open unemployment rate, poverty line, and crime clearence on criminal property rate in the provinces of Sumatra. This study uses panel data from 2010 - 2019 in 10 provinces in Sumatra using the FEM (Fixed Effect Model) model. The dependent variable used is criminal property rate and the independent variables are economic inequality, open unemployment rate, poverty line and crime clearence. The results showed that the variables of economic inequality and proverty line had a positive significant effect on criminal property rate in Sumatera. Meanwhile, the open unemployment rate variable has a positive but not significant effect on criminal property rate in Sumatera, and the crime clearence has a significant negative effect on criminal property rate in Sumatera.

Keywords: Economic Inequality, Unemployment, Poverty, Criminal Property, Panel Data

ABSTRAK

PENGARUH KETIMPANGAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, GARIS KEMISKINAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DI PULAU SUMATERA

Oleh

ABDIRROHMAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2010 - 2019 di 10 provinsi di Sumatera menggunakan model FEM (*Fixed Effect Model*). Variabel terikat yang digunakan adalah jumlah kejahatan pencurian dan variabel bebas meliputi ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ketimpangan ekonomi dan garis kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera, dan variabel penyelesaian tindak pidana berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

Kata kunci: Ketimpangan ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, Kejahatan Pencurian, Data Panel

PENGARUH KETIMPANGAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, GARIS KEMISKINAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DI PULAU SUMATERA

Oleh

ABDIRROHMAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2021

Judul Skripsi	: **PENGARUH KETIMPANGAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, GARIS KEMISKINAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DI PULAU SUMATERA**
Nama Mahasiswa	: ***Abdirrohman***
No. Induk Mahasiswa	: **1711021062**
Program Studi	: **Ekonomi Pembangunan**
Fakultas	: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dr. Heru Wahyudi, S.E.,M.Si.
NIP. 197702122006041001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP. 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.** .....

Penguji I : **Dr. Arvina Ratih Y T, S.E., M.M.** .....

Penguji II : **Asih Murwiati, S.E., M.E.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Desember 2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2021

Penulis

ABDIRROHMAN

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Serang pada tanggal 16 September 1998, sebagai anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak A'la Rotbi dan Ibu Rusmi Andarwati. Penulis memiliki kakak perempuan bernama Ulfah Hajar Munawwaroh, adik perempuan bernama Indi Ghina Nafsiyya dan adik laki-laki bernama Abdattawwab.

Pendidkan yang telah di tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Aweh 03 di Lebak-Banten yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Terpadu (SMPT) Al-Qudwah diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas Terpadu (SMAT) Al-Qudwah dan diselesaikan pada tahun 2017.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur SBMPTN pada tahun 2017. Penulis mengambil konsentrasi Ekonomi Perencanaan. Kegiatan organisasi yang pernah diikuti yaitu menjadi Keluarga Muda BEM (KMB) BEM U KBM Unila 2017, Keluarg Muda Rois FEB Unila 2017, Staff Ahli Kaderisasi Rois FEB Unila 2018, Staff Ahli Kementrian Politik, Hukum dan HAM BEM U KBM Unila 2018, Ketua Bidang Kebijakan Publik PK KAMMI Unila 2018, Ketua Bidang Kaderisasi Rois FEB Unila 2019, Ketua Kaderisasi PK KAMMI Unila 2019, Ketua DPM U KBM Unila 2020, Ketua MPM KBM Unila 2021, Ketua Bidang Humas PD KAMMI Kota Bandarlampung dan Ketua HIMA PUI Lampung 2021.

Pada tahun 2019 mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, serta Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun 2020 penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji selama 40 hari.

MOTTO

"*Adapaun hamba-hamba Allah SWT yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina) mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan*".

(Qs. Al Furqon : 63)

"Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya ".

(Imam Syafi'i)

"*Hidup Berarti Baru Mati*".

(Abdirrohman)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta, yang penulis banggakan, sebagai panutan dalam hidup, yang selalu memberikan semangat tanpa henti kepada penulis yaitu Abi dan Ummi. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan dan semua hal yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah bisa terbalas. Maaf karena bapak harus pergi terlebih dahulu sebelum melihat akhir dari proses pendidikan ini.

Untuk kakakku dan suami Ulfah Hajar Munawwaroh dan kedua adikku yaitu Indi Ghina Nafsiyya dan Abdattawwab terimakasih untuk segala motivasi, semangat, canda tawa, serta kepercayaan yang begitu besar dalam mendukung semua pencapaian penulis serta doa yang tiadahenti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Heru dan Ibu Asih sebagai dosen pembimbing terhebat yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa bimbingan bapak dan ibu skripsi ini tidak akan tuntas, dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sahabat-sahabat yang senantiasa membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan karya tulis ini. Serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan. Sholawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Skripsi ini berjudul "Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Garis Kemiskinan dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencuria di Pulau Sumatera" Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasLampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E.,M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, dukungan dan saran, serta motivasi luar biasanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Asih Murwiati, S.E.,M.E. selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, dukungan dan saran, serta motivasi luar biasanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Arvina Ratih Yulihar T, S.E., M.M.. selaku dosen penguji yang senantiasa memberi masukan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Dr. Marselina, S.E.,M.P.M. selaku dosen pembahas seminar proposal dan hasil yang telah memberikan nasihat dan bimbingan yang berharga untuk perkembangan studi penulis.
7. Ibu Tiara Nirmala, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas seminar proposal yang telah memberikan nasihat dan bimbingan yang berharga untuk perkembangan studi penulis.
8. Bapak Dr. Saimul, S.E., M.Si, selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masaperkuliahan.
10. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah banyak memberikan bantuan serta pelayanan terbaik untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
11. Abi dan Ummi tercinta, Abi A'la Rotbi dan Ummi Rusmi Andarwati. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dukungan, bimbingan, dan do'anya selama ini.
12. Teteh Ulfah dan Mas Ginanjar, Ghina dan Awwab yang selalu mensupport penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
13. Teman – teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2017, Keluarga Besar Rois FEB Unila, Keluarga Besar BEM U KBM Unila 2017, Keluarga Besar BEM U KBM Unila 2018, Keluarga Besar DPM U KBM Unila 2020, Keluarga Besar DPM U KBM Unila 2021, Keluarga Besar PUI Lampung dan Keluarga Besar KAMMI Lampung yang telah menjadi bagian sejarah masa perkuliahan.

14. Keluarga KKN Desa Wonosari, Reza afrian, Cahyo Eko, Inggit, Neneng dan Firan serta semua warga Desa Wonosari terima kasih telah mambantu proses KKN dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Semoga segala dukungan, bimbingan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 15 Desember 2021

Penulis

Abdirrohman

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 14
1.3 Tujuan Penelitian 15
1.4 Manfaat Penelitian 15
II. TINJAUAN PUSTAKA **20**
2.1 Tinjauan Teoritis 20
2.1.1 Kejahatan 20
2.1.2 Ketimpangan 21
2.1.3 Pengangguran 23
2.1.4 Kemiskinan 24
2.2 Tinjauan Empiris 29
2.3 Kerangka Pemikiran 34
2.4 Hipotesis Penelitian 35
III. METODE PENELITIAN **36**
3.1 Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian 36
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitan 37
3.3 Metode Analisis 38
3.3.1 Regresi Data Panel 38
3.4 Prosedur Analisis Data 40
3.4.1 Metode Estimasi Model 40
3.4.2 Pemilihan Metode Regresi Data Panel 42
3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik 43
3.4.4 Pengujian Hipotesis 45
3.4.5 Koefisien Determinasi (R^2) 47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN **48**
4.1 Analisis Statistik Deskriptif 48

4.1.1 Tingkat Kejahatan Pencurian (PNC) 49
4.1.2 Ketimpangan Ekonomi (GINI) 49
4.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 50
4.1.4 Garis Kemiskinan (GK) 50
4.1.5 Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) 51
4.2 Pengujian Asumsi Klasik 51
4.2.1 Uji Normalitas Residual 51
4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 55
4.2.3 Uji Multikolinieritas 60
4.2.4 Uji Autokorelasi 60
4.3 Hasil Regresi Model Data Panel 57
4.3.1 Uji Kriteria Pemilihan Model Penelitian 57
4.3.2 Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel 60
4.3.3 Pengujian Hipotesis 60
4.3.4 Penafsiran Koefisien Determinasi (R^2) 63
4.4 Pembahasan Hasil Penlitian 64
4.4.1 Pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap kejahatan pencurian di Pulau Sumatera 64
4.4.2 Pengaruh pengangguran terbuka terhadap kejahatan pencurian di Pulau Sumatera 70
4.4.3 Pengaruh garis kemiskinan terhadap kejahatan pencurian di Pulau Sumatera 69
4.4.4 Pengaruh penyelesaian tindak pidana terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera 71
4.4.5 Pengaruh ketimpangan ekonomi, pengangguran terbuka dan garis kemiskinan terhadap kejahatan pencurian di Pulau Sumatera 72
4.5 Individual Effect 73
V. SIMPULAN DAN SARAN 83
5.1 Simpulan 83
5.2 Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 APBN Pemerintah Pusat berdasarkan Fungsinya 11
1.2 Jumlah Kejahatan berdasarkan Jenis Kejahatan 15
3.1 Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data..... 40
4.1 Hasil Analisis Deskriptif..... 52
4.2 Uji Heteroskedastisitas..... 59
4.3 Uji Multikolinieritas..... 60
4.4 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi..... 60
4.5 Uji Chow 62
4.6 Uji Hausman 63
4.7 Hasil Estimasi Data Panel Pendeketan *Fixed Effect* 64
4.8 Uji t-statistik variabel Ketimpangan Ekonomi..... 65
4.9 Uji t-statistik variabel Tingkat Pengangguran Terbuka 65
4.10 Uji t-statistik variabel Garis Kemiskinan..... 66
4.11 Uji t-statistik variabel Penyelesaian Tindak Pidana..... 66
4.12 Uji F-statistik..... 67
4.13 Nilai *Individual Effect* Intersep 10 Provinsi di Pulau Sumatera 77

DAFTAR GAMBAR

Tabel Halaman

1.1 Ketimpangan Pendapatan Penduduk Berdasarkan Indek Gini 6
1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 7
1.3 Garis Kemiskinan..... 8
1.4 Proporsi Penduduk yang merasa aman 10
1.5 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*crime total)* 12
1.6 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana 13
1.7 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana..... 14
1.8 Jumlah Tindak Kejahatan Pencurian..... 16
1.9 Grafik Tingkat Kejahatan Pencurian, Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Garis Kemiskinan 17
2.1 Kurva Lorenz 26
2.2 Kerangka Pemikiran..... 39
4.1 Hasil Estimasi Uji Normalitas pertama..... 56
4.2 *Boxplot sebelum winsorizing*..... 57
4.3 *Boxplot sesudah winsorizing*..... 58
4.4 Hasil Estimasi Uji Normalitas kedua 58
4.5 Uji Durbin-Watson..... 61
4.6 Grafik kejahatan pencurian, angka partisipasi sekolah dan Pengangguran 72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah usaha – usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi juga sebagai suatu proses yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan. Yang tidak hanya mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga mencakup ketidakmerataan potensi sumberdaya alam, letak geografis, dan kualitas sumberdaya manusia di berbagai wilayah yang diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerahnya telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Todaro, 2011).

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan daerah. Selain pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi, proses pembangunan juga bertujuan untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Berbagai studi telah menunjukkan hubungan dan kaitan yang kuat antara kesenjangan dan ketimpangan dengan tingkat tindak pidana kriminalitas. Lederman (2002) menjelaskan bahwa semakin timpang suatu wilayah maka akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kriminalitas. Ketimpangan ekonomi pada umumnya diukur dengan melihat distribusi pendapatan perorangan menggunakan indeks gini rasio. Berikut data grafik Ketimpangan Pendapatan berdasarkan indek gini di Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

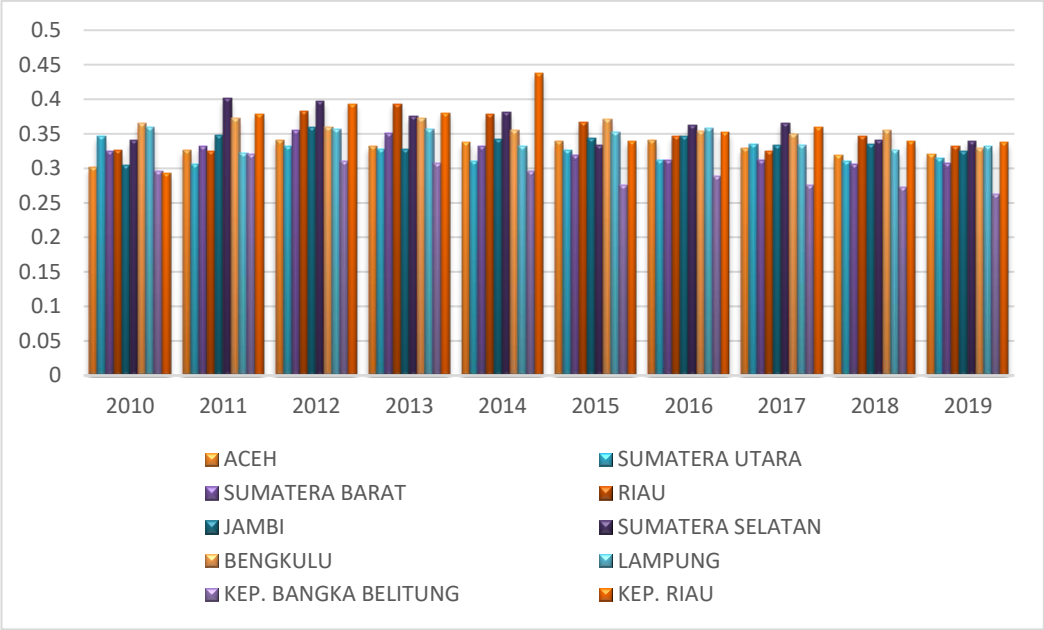

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.1 Ketimpangan Pendapatan Penduduk Berdasarkan Indek Gini Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan pemerataan pendapatan penduduk di Pulau Sumatera. Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai koefisien gini tertinggi sebesar 0,437 dibandingkan dengan provinsi – provinsi lain pada tahun 2014. Serta Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi yang memiliki nilai koefisien indeks gini terendah sebesar 0,262 dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya pada tahun 2019. Semakin tinggi nilai koefisien gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dan sebaliknya semakin rendah nilai koefisien indeks gini semakin merata pula distribusi pendapatan. ketidakmerataan pendapatan ini didapatkan dari perhitungan jumlah pendapatan perorangan di suatu wilayah tanpa mempersoalkan apakah pendapatan itu hanya diperoleh dari gajinya karena bekerja atau juga dihasilkan dari sumber lain (Todaro & Smith, 2011).

Beberapa studi empiris menyatakan, bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi besaran jumlah pendapatan seseorang diantaranya pendidikan dan kesehatan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bloom (2004) pekerja yang sehat secara fisik dan mental serta memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan produktifitasnya dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Rendahnya tingkat pendidikan dan jaminan kesehatan yang dimiliki seseorang akan mengakibatkan semakin sempitnya peluang masuk kedalam pasar tenaga kerja dan semakin sulitnya meningkatkan produktifitas kerja, sehingga akan berdampak pada tingginya jumlah pengangguran seperti yang dikatakan oleh Arsono (2014).

Selain itu, dalam indikator ketimpangan ekonomi tingkat pengangguran menjadi salah satu faktor pembentuknya (Fair, 2006). Tingginya persentase tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif dengan tingkat tindak kriminalitas pencurian properti seperti pendapat Machin & Maghir (2000) dalam penelitiannya. Berikut data grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

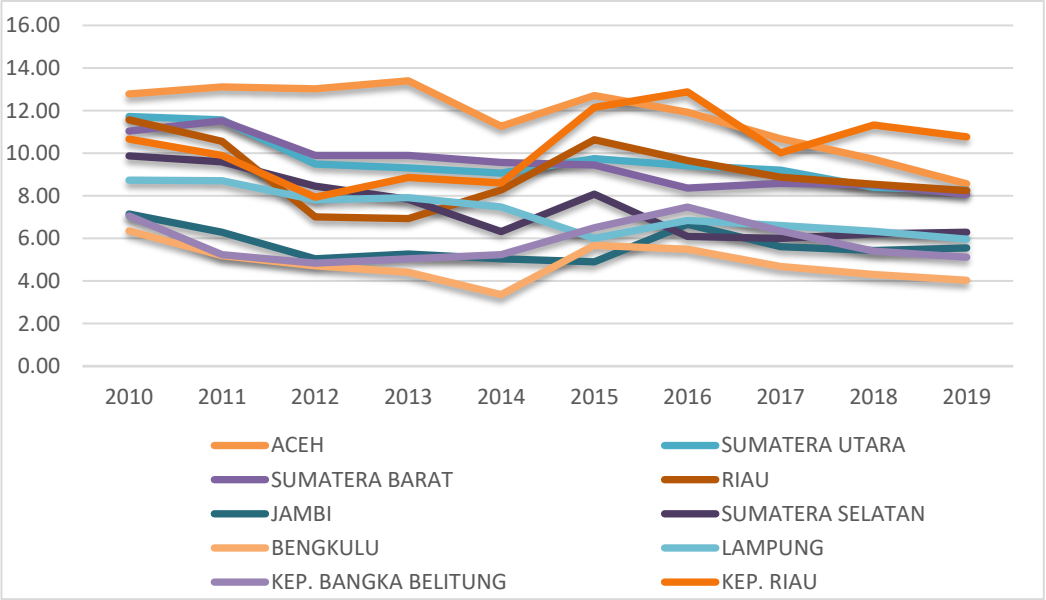

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2019

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Pulau Sumatera. Yang dapat kita ketahui Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 13,4% menjadi persentase peningkatan tertinggi selama 10 tahun. Sedangkan Provinsi Bengkulu menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 3,36%.

Berdasarkan data grafik diatas, persentase tingkat pengangguran terbuka menggambarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Selain itu, dalam indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah garis kemiskinan menjadi salah satu faktor pembentuknya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2011) kemiskinan adalah seseorang yang sama sekali atau hampir tidak memiliki jaminan dan tidak bisa memperoleh pinjaman untuk memulai usaha karena tidak sempurnanya pasar modal yang menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan subsisten atau pekerjaan berupah rendah, meskipun mereka dapat berbuat jauh lebih baik jika distribusi pendapatan yang lebih adil. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan jumlah atau hitungan perorangan dari orang-orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan (Todaro & Smith, 2011). Berikut data grafik kemiskinan yang digambarkan dalam Garis Kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

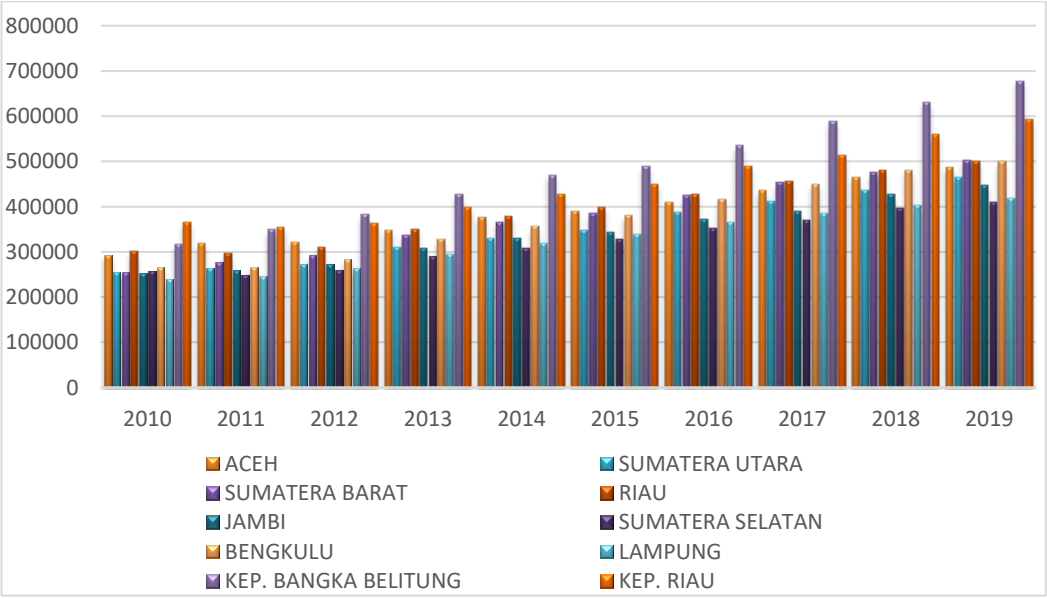

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.3 Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.

Pada Gambar 1.3 besaran garis kemiskinan menurut provinsi di Pulau Sumatera. Bahwa Provinsi Bangka Belitung menjadi wilayah paling besar garis kemiskinannya sebesar 677.716 rupiah perkapita pada tahun 2019. Sedangkan Provinsi Lampung menjadi wilayah paling kecil garis kemiskinannya sebesar 238.768 rupiah perkapita pada tahun 2010.

Berdasarkan data grafik yang dipaparkan, garis kemiskinan di suatu wilayah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap peluang terjadinya tindak kriminalitas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dulkiah & Nurjanah (2018) di mana terdapat kohesi antara tingginya angka garis kemiskinan menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin besar kemungkinan seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, salah satu yang menjadi potensi besar adalah tindakan kriminalitas.

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum, serta tidur dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Menurut teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan (Maslow, 1943). Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. Berikut data tingkat rasa aman yang digambarkan dalam proporsi penduduk yang merasa aman di lingkungannya di Pulau Sumatera tahun 2014-2020.

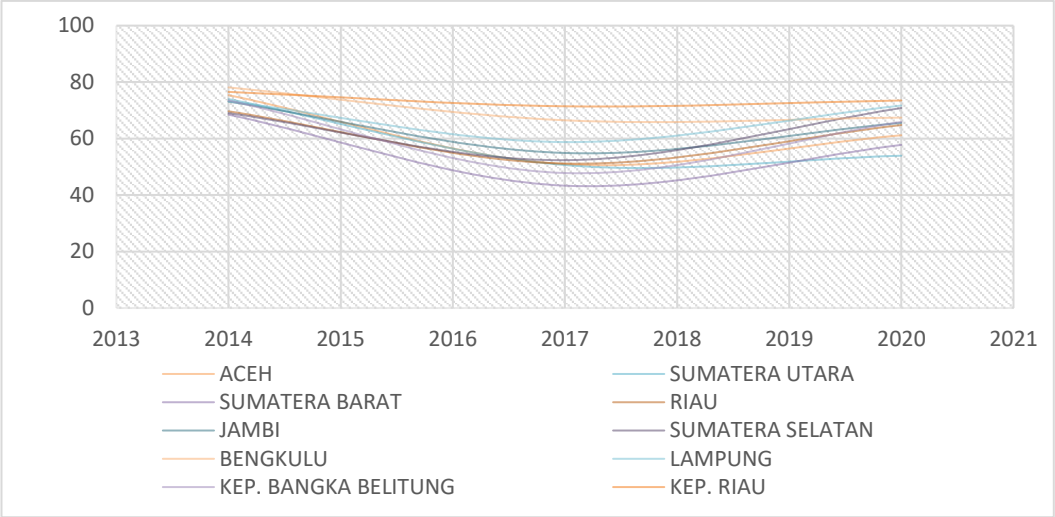

Sumber : Badan Pusat Statisik, 2021

Gambar 1.4 Proporsi Penduduk yang merasa aman di lingkungannya di Pulau Sumatera tahun 2014 – 2020.

Pada Gambar 1.4 dapat kita ketahui bahwa persentase proporsi penduduk yang merasa aman di lingkungannya rata-rata dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami fluktuatif ke arah penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi karena ada keterkaitannya dengan ketimpangan ekonomi, pengangguran dan garis kemiskinan yang terjadi mengalami trend yang meningkat.

Rasa aman (*security)* merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap Martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani

masyarakat serta menegakkan hukum. Berdasarkan amanat konstitusi, keamanan menjadi salah satu komponen belanja negara menurut fungsinya, yakni dalam rangka melaksanakan berbagai prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Berikut tabel anggaran belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi tahun 2010-2019.

Tabel 1.1 APBN Pemerintah Pusat berdasarkan Fungsi Tahun 2010-2019

Fungsi APBN	Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pelayanan umum	495320	517167	590841	720060	794772	891768	316533	355849	435905	517342
Pertahanan	20968	47419	72473	81769	86307	96824	99649	108294	107829	108429
Ketertiban dan keamanan	**14926**	**22067**	**30196**	**36487**	**37953**	**46138**	**109794**	**121576**	**135993**	**142972**
Ekonomi	57359	101414	102734	122888	128274	143526	360226	310560	335464	389600
Lingkungan hidup	7889	11070	11451	12446	12179	10679	12088	11919	15680	17764
Perumahan dan fasilitas umum	20907	23425	26477	30722	31487	20466	34651	29683	31508	26516
Kesehatan	18002	13649	15564	17493	13078	21113	67214	61724	65066	62758
Pariwisata dan budaya	1416	2901	2454	2509	2053	1926	7433	5371	7456	5325
Agama	913	1397	3562	4100	4463	5290	9785	9727	9473	10143
Pendidikan	84086	91483	103667	118467	131314	146393	150090	143134	147562	152690
Perlindungan sosial	3457	4586	5578	7440	8063	8319	158089	157689	162557	200801

Sumber : Kementrian Keuangan, 2021

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa anggaran untuk keamanan mengalami trend peningkatan besaran pengeluaran belanja negara berdasarkan fungsi. Bahkan dari tahun 2016 keamanan dan ketertiban sudah berada pada angka 10% dari total anggaran belanja negara, dengan rata-rata 7% besaran anggaran belanja dari tahun 2010-2019, termasuk ke dalam lima besar anggaran belanja negara berdasarkan fungsinya. Hal ini menunjukkan dari aspek ekonomi keamanan memiliki fokus yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Karena apabila keamanan ini tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, maka akan berdampak kepada stabilitas nasional yang merupakan prasayarat pembangunan nasional serta berdampak pada aktivitas ekonomi lainya.

Seperti halnya minat investasi yang dijelaskan oleh Hanim dan Raginum (2010) dalam penelitiannya bahwa faktor-faktor yang dominan sebagai penentu minat investasi bagi investor yang tertinggi adalah (1) faktor pertumbuhan ekonomi; (2) biaya pelayanan birokrasi; (3) kebijakan pemerintah; (4) kelembagaan; dan (5) gangguan keamanan. Oleh karena itu, perlu ada upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kejahatan dan memberikan rasa aman.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Berikut data grafik Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Daerah di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

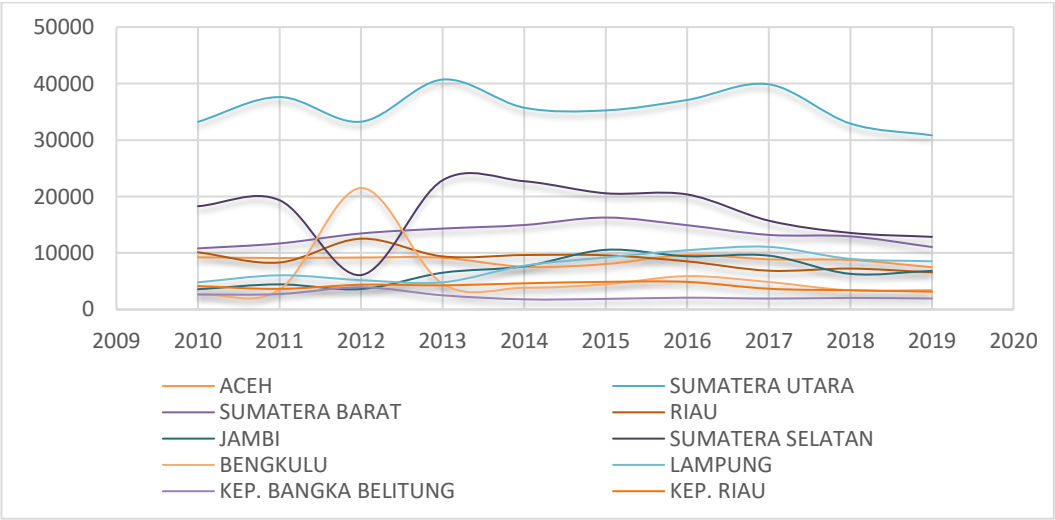

Sumber : Badan Pusat Statisik, 2021

Gambar 1.5 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*total crime)* Menurut Kepolisian daerah di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.

Dari Gambar 1.5 dapat dilihat perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan di Pulau Sumatera selama tahun 2010-2019 menurut kepolisian daerah dimana Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah tindak pidana terbesar 40.709 ribu kasus yang terjadi pada tahun 2013.

Sedangkan Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan jumlah tindak pidana terkecil 1.796 ribu kasus yang terjadi pada tahun 2014. Perlu menjadi catatan bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan tingkat resiko terkena kejahatan atau *crime rate* setiap 100.000 penduduk. Meskipun Provinsi Bangka Belitung dari sisi jumlah kejadian (*crime total)* termasuk yang paling terendah pada tahun 2014, tetapi dari sisi resiko terkena kejahatan *(crime rate)* termasuk kelompok tertinggi. Seperti data grafik Risiko Penduduk Terkena Kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

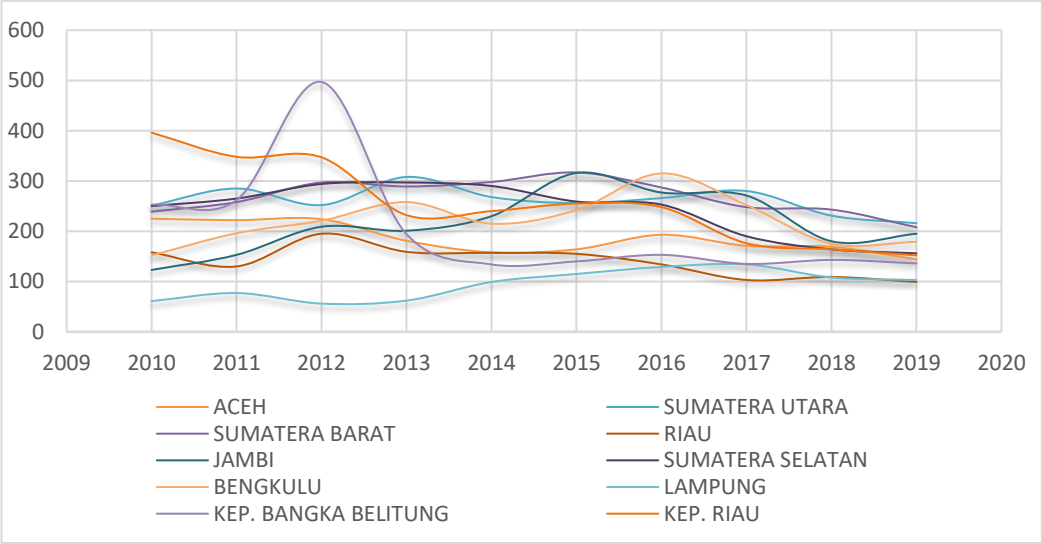

Sumber : Badan Pusat Statisik, 2021

Gambar 1.6 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.

Dari Gambar 1.6 Polda Bangka Belitung mencatat pada tahun 2012 tingkat resiko terkena kejahatan sebesar 497 (setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 497 orang yang beresiko terkena tindak kejahatan). Sedangkan pada tahun 2013 Polda Sumatera Utara mencatatat tingkat resiko terkena kejahatan sebesar 308 termasuk dalam kelompok tingkat resiko tertinggi. Di mana pada tahun yang sama Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah kejahatan tertinggi. Artinya dari sisi frekuensi dan intensitas kejahatan pada wilayah tersebut sama-sama tinggi.

Selain itu, untuk melihat seberapa tingginya tindakan kejahatan di suatu daerah dipengaruhi juga dengan persentase penyelesaian tindakan kejahatan di daerah tersebut, karena penyelesaian dari sebuah kasus kejahatan akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya tindakan kejahatan. Berikut adalah grafik persentase penyelesaian tindak pidana menurut provinsi di Pulau Sumatera.

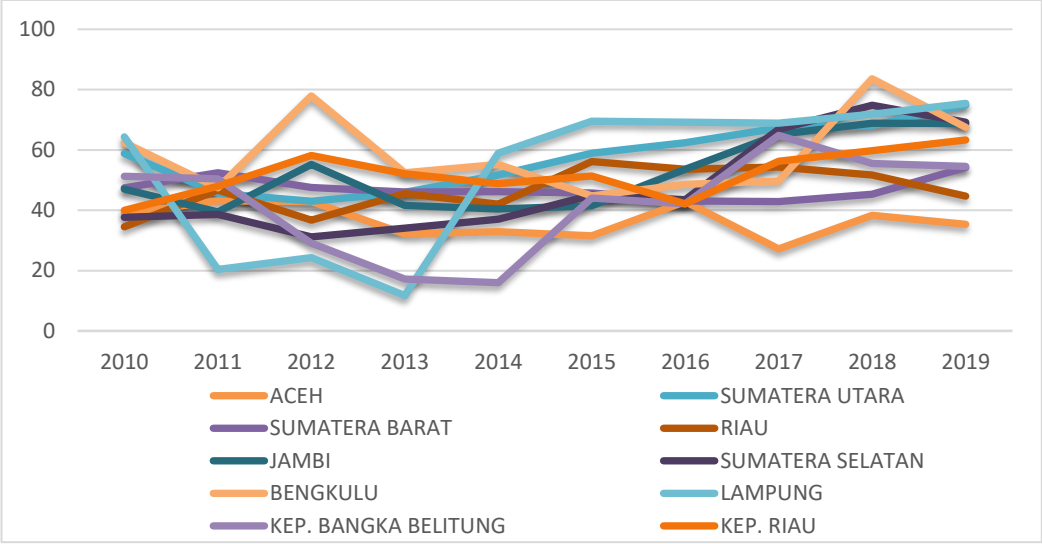

Sumber : Badan Pusat Statisik, 2021

Gambar 1.7 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.

Dari Gambar 1.7 Polda Lampung mencatat pada tahun 2013 persentase penyelesaian tindak pidana sebesar 11,27% menjadi penyelesain terkecil di antara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan pada tahun 2018 Polda Bengkulu mencatatat persentase penyelesaian tindak pidana sebesar 83,59% termasuk dalam tingkat penyelesaian tindak pidana tertinggi.

Jumlah kejahatan *(crime total)*, tingkat resiko terkena kejahatan *(crime rate)* dan persentase penyelesaian tindak pidana *(crime clearence)* yang dipaparkan dalam data grafik merupakan angka kejahatan secara umum karena merupakan hitungan sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan. Angka kejahatan tersebut akan lebih dapat menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail diantaranya : target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, Negara, dan sebagainya), tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang), bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kekerasan atau tanpa kekerasan).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS). Berikut data tabel Jumlah Kejahatan berdasarkan Jenis Kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

Tabel 1.2 Jumlah Kejahatan berdasarkan Jenis Kejahatan di Pulau Sumatera

Jenis kejahatan	Jumlah kejahatan berdasarkan jenisnya menurut kepolisian daerah di pulau sumatera									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pembunuhan	531	1562	478	452	495	485	496	434	359	377
Penganiayaan	13143	40875	13832	15983	15282	15567	14529	13088	1105	11193
Perkosaan	855	2490	666	758	903	845	787	733	614	556
Pencabulan	468	1736	785	754	1087	899	929	1006	1043	1194
Penculikan	114	344	138	192	156	135	148	63	62	62
Mempekerjaka an Anak dibawah umur	56	363	391	497	336	443	601	560	448	465
Pencurian	**41010**	**126995**	**50873**	**52789**	**51471**	**51080**	**49093**	**42300**	**35865**	**34138**
Narkoba	5851	19026	6168	8349	8283	11884	13128	14256	16313	20931
Korupsi	69	249	113	120	183	505	376	167	157	169

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari Tabel 1.2 diatas dapat kita simpulkan bahwa tindak kejahatan pencurian menjadi jenis kejahatan tertinggi sebesar 126.995 ribu kejadiannya pada tahun 2011. Diikuti kejahatan penganiayaan dan kejahatan narkoba. Sedangkan kejahatan penculikan menjadi jenis kejahatan terendah di Pulau Sumatera.

Berdasarkan data tabel diatas, menurut Priatna (2016) dalam penelitiannya bahwa kejahatan pencurian yang tinggi di suatu wilayah merupakan indikasi bahwa adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak dapat dipenuhi sehingga seseorang harus menempuh jalan yang tidak wajar untuk memenuhinya. Dapat diartikan bahwa ketika tingkat kejahatan pencurian di suatu wilayah tinggi dipengaruhi oleh faktor ketimpangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di suatu wilayah. Untuk dapat melihat lebih jelas keterkaitan antara jumlah kejahatan pencurian di Pulau Sumatera berikut data grafik Jumlah Kejahatan Pencurian tahun 2010-2019.

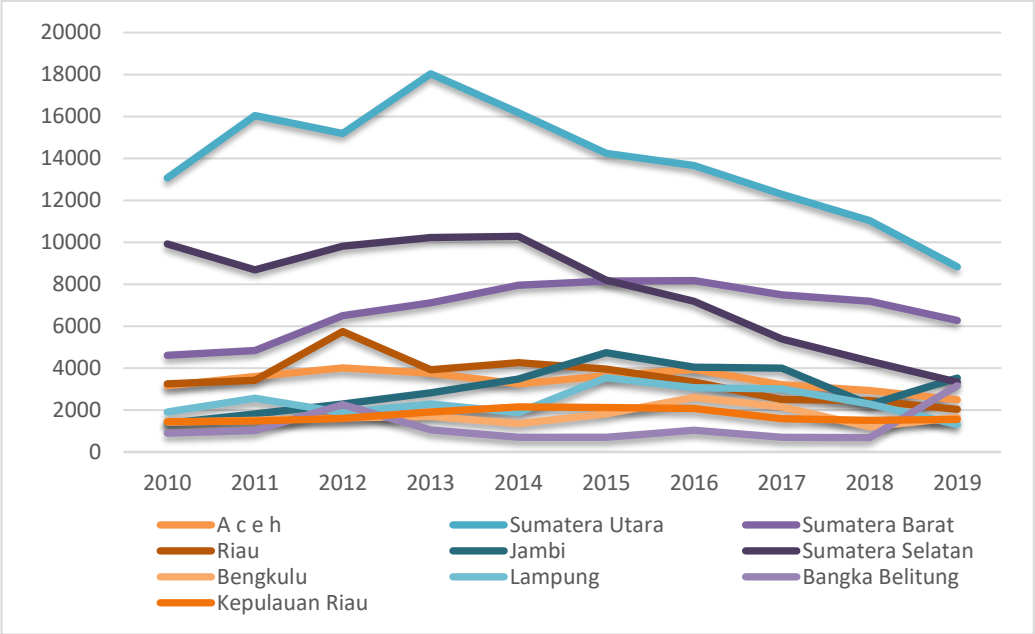

Sumber : Badan Pusat Statisik, 2021

Gambar 1.8 Jumlah Tindak Kejahatan Pencurian Menurut Kepolisian Daerah di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.

Pada Gambar 1.8 dapat kita lihat jumlah kejahatan pencurian terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 18.034 ribu kasus pada tahun 2013 dan berfluktuatif setiap tahunya dengan angka paling besar di antara wilayah yang lain. Sedangkan kejahatan pencurian terkecil terjadi di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 680 kasus. Berdasarkan data grafik pada gambar diatas, Sumatera Utara dengan jumlah kejahatan pencurian tertinggi juga termasuk tiga wilayah yang memiliki angka ketimpangan pendapatan, pengangguran dan kemiskinan yang tinggi sebagaimana yang dijelaskan pada data grafik sebelumnya. Lebih jelas dapat dilihat dalam data grafik gabungan variabel tingkat kejahatan pencurian, ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran dan garis kemiskinan sebagai berikut.

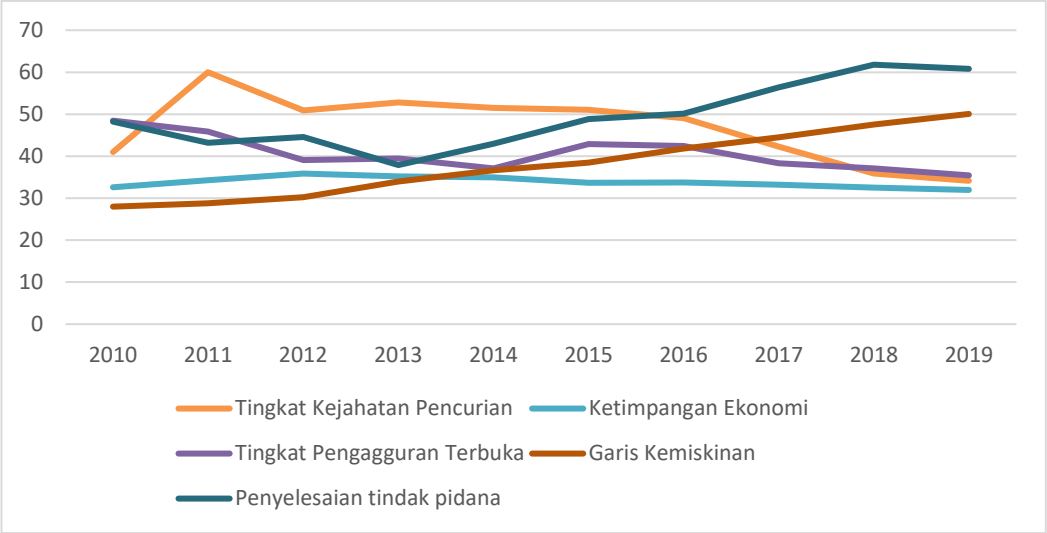

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.9 Grafik Tingkat Kejahatan Pencurian, Ketimpangan Ekonomi,Tingkat Pengangguran, Penyelesaian Tindak Pidana dan Garis Kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

Bisa kita lihat dalam Gambar 1.9 bahwa secara umum peningkatan tingkat ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran, garis kemiskinan dan penurunan persentase penyelesaian tindak pidana diikuti dengan meningkatnya kejahatan pencurian. Seperti pada tahun 2012 variabel ketimpangan ekonomi 3,586 poin , pengangguran 39,11%, garis kemiskinan 302.142 rupiah perkapita dan persentase penyelesaian tindak pidana 44,6%, mengalami peningkatan di tahun 2013 untuk variabel ketimpangan ekonomi 3,592 poin, pengangguran 39,43%, garis kemiskinan 339.365 rupiah perkapita dan penurunan persentase penyelesaian tindak pidana 37,89% selaras dengan peningkatan tingkat kejahatan pencurian yang sebelumnya pada tahun 2012 sebanyak 50.873 kasus meningkatkan pada tahun 2013 sebanyak 52.789 kasus. Begitu juga pada saat trend menurun.

Dapat kita simpulkan upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional dengan mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi sehingga pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Sehingga analisis variabel tingkat kejahatan pencurian digunakan dalam penelitian ini dikarenakan variabel tersebut dapat menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu syarat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian "Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Garis Kemiskinan dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh garis kemiskinan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh penyelesaian tindak pidana terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?
3. Untuk mengetahui pengaruh garis kemiskinan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?
4. Untuk mengetahui pengaruh penyelesaian tindak pidana terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?
5. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan garis kemiskinan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitan ini adalah :

1. Memperoleh informasi tentang pengaruh variabel ekonomi terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera Tahun 2010 – 2019
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk menekan tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera
3. Penelitian ini dapat dijadikan dasar dan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Kejahatan

2.1.1.1 Definisi Kejahatan

Secara etimologis, istilah kejahatan atau kriminalitas berasal dari kata *"crime"* dan *"logos". Crime* berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan, jadi secara umum kriminologi dapat ditasfirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan (Abdulsyni, 1987).

Kejahatan secara yuridis ialah sesuatu wujud tingkah laku yang berlawanan dengan moral kemanusiaan, merugikan warga serta melanggar hukum dan undang– undang pidana. Setelah itu secara sosiologis, kejahatan merupakan seluruh wujud perkataan, perbuatan, serta tingkah laku yang secara murah, politis serta sosial- psikologis sangat merugikan warga, melanggar norma- norma asusila, serta melanda keselamatan warga menurut Kartono (2008 : 122).

Kejahatan dikelompokkan berdasarkan jenisnya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The Internasional Classification of crime for statistical Purposes (ICCS)* yang digagaas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni :

1. Target dari kejadian (orang, harta benda, ketertiban umum, negera, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik barang dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak/milik barang tanpa kekerasan, dan sebegainya).

Pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbunyi :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pencurian termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Jenis tindakan pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh sebab itu tindak pidana kejahatan menjadi tindak pidana paling tinggi kejadiannya di Indonesia.

Menurut Sullivan (dalam Maulana, 2014) dalam pandangan ilmu ekonomi sendiri memandang kejahatan sebagai sesuatu yang menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumberdaya dan mendistorsi harga sehingga jumlahnya harus ditekan. Oleh karenanya, ilmu ekonomi menggunakan kerangka yang dimiliki dalam mengoptimalkan alokasi sumberdaya untuk menekan angka kejahatan ke tingkat serendah-rendahnya (Fauziah, 2018).

2.1.1.2 Aspek Ekonomi dari Kejahatan

Analisa ekonomi dalam tindak kejahatan digunakan untuk menganalisis kejahatan property, yaitu kejahatan dengan motif meningkatkan utilitas (pendapatan) bagi perilaku yang terbatas oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dari aktivitas legalnya sehingga mengharuskan individu melakukan tindak kejahatan. Terdapat asumsi rasionalitas dalam ekonomi kejahatan yaitu pelaku kejahatan melakukan aksinya berdasarkan perhitungan *cost benefit* dan melakukan respon terhadap insentif. Oleh karena itu, kejahatan yang bisa dianalisa melalui pendekatan ekonomi adalah kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian adalah kejahatan yang ditujukan untuk mengambil harta benda milik korban. Pada umumnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak menggunakan kekerasan, serta dilandasi dengan perhitungan rasional untung rugi.

2.1.1.3 Teori Tingkah Laku Konsumen : Teori Nilai Guna (Utilitas)

Menurut Sadono (2016) Nilai guna (utilitas) dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Di dalam kenyataannya, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya, sebab ia dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, Sir John R. Hicks telah mengembangkan satu pendeketan baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan oleh konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas dengan analisis kurva kepuasan sama (*indifference curve*) dan garis anggaran pengeluaran (*budget line*).

Berdasarkan analisis itu, dapat disimpulkan bahwa seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Artinya apabila kurva kepuasan sama menunjukan kebutuhan yang diinginkan berada di atas garis anggaran pengeluaran, maka konsumen akan meningkatkan utilitas dengan memperbesar pendapatan, apabila terdapat keterbatasan kemampuan dalam memenuhi peningkatan pendapatan maka seorang konsumen dapat melakukannya melalui aktivias illegal seperti tindak kejahatan. Menurut Fauziah (2018) dalam penelitiannya keputusan melakukan kejahatan adalah keputusan yang rasional karena didasarkan atas maksimisasi utilitas.

2.1.1.4 Pendekatan Rasional Ekonomi untuk Analisis Kejahatan

Menurut Sullivan (2012) analisis kejahatan dengan pendekatan ekonomi menggunakan asumsi dasar bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional tanpa mempertimbangkan benar salahnya suatu hal. Landasan utama yang digunakan ialah untung dan rugi yang didapatkan dari pengambilan keputusan. Keputusan melakukan tindak kejahatan adalah keputusan yang rasional berdasarkan maksimisasi kepuasan (*maximum utility).*

Kurva utilitas menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kepuasan yang merefleksikan asumsi *diminishing marginal utility* pendapatan yakni seiring peningkatan pendapatan maka kepuasan juga akan meningkat namun dengan tingkat yang menurun.

Model *rational criminal activity* pada dasarnya berpendapat bahwa keputusan individu untuk menjadi kriminal atau tidak didasarkan kepada analisis *cost and benefit.* Secara eksplisit, keputusan individu untuk melakukan kejahatan berbasis kepada keinginannya untuk memenuhi level konsumsi yang telah ditargetkan. Jika seorang individu tidak dapat mencapai level konsumsi yang diinginkan melalui jalan legal, maka untuk memenuhinya individu tersebut berkemungkinan melakukan aktivitas kriminal (Becker, 1968).

Lebih lanjut, model rasional kejahatan menyatakan bahwa hanya ada tiga alas an seseorang melakukan tindak kejahatan : pertama, beberapa orang secara relatif sangat pandai melakukan tindak criminal sehingga kemungkinan untuk tertangkap sangat kecil sementara ekspektasi harta rampasanya sangat besar. Kedua, karena memiliki opportunity cost yang sangat rendah sehingga tidak menjadi masalah saat mereka harus kehilangan waktu mereka karena di penjara, contohnya orang miskin yang hidup bergelandang dan tidak memiliki pekerjaan. Ketiga, karena mereka memang tidak memiliki rasa hormat terhadap norma-norma dalam masyarakat dan tidak menganggap bahwa tindak kejahatan adalah tindakan yang salah, sehingga tidak masalah baginya jika hanya mendapatkan hasil yang sedikit (Sullivan, 2012).

Dengan pendekatan rasionalitas ini diharapkan mampu untuk memprediksi secara tepat untung rugi yang pelaku dapatkan dari pengambilan keputusan untuk masuk ke dalam aktivitas kriminal.

2.1.1.5 Teori Hierarki Kebutuhan Manusia

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum, serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting (Maslow, 1943).

Dalam pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat, dipengaruhi pula oleh faktor keamanan yang dirasakan dalam lingkup kecil atau mikro dan makro, keamanan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi makro seperti minat investasi. Menurut Hanim dan Raginum (2010) dalam penelitiannya bahwa faktor-faktor yang dominan sebagai penentu minat investasi bagi investor yang tertinggi adalah (1) faktor pertumbuhan ekonomi; (2) biaya pelayanan birokrasi; (3) kebijakan pemerintah; (4) kelembagaan; dan (5) gangguan keamanan. Oleh karena itu pula kejahatan atau kriminalitas menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskalnya.

Hal ini ditunjukkan, bahwa dalam postur APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) keamanan termasuk lima besar yang diprioritaskan dalam anggaran belanja negara berdasarkan fungsinya. Upaya untuk memenuhi dan menciptkan rasa aman dari tindak kejahatan pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyasrakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2.1.2 Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Distribusi pendapatan perorangan adalah ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom untuk mengukur ketimpangan. Ukuran ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga. Cara memperoleh pendapatan tidak dipertimbangkan. Faktor yang penting adalah seberapa besar perolehan masing – masing orang atau rumah tangga tanpa mempersoalkan apakah pendapatan itu hanya diperoleh dari gajinya karena bekerja atau juga dihasilkan dari sumber lain seperti bunga, laba, uang sewa hibah atau harta warisan (Todaro & Smith, 2011).

Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara – negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan (Ilham, 2015). Dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk (*Distribution Income Disparities*) dapat dilakukan dengan berbagai macam alat yang dapat dijumpai, diantaranya yaitu :

2.1.2.1 Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz ialah suatu grafik yang menggambarkan perbedaan distribusi ukuran pendapatan dari kemerataan sempurna (Todaro & Smith, 2011).

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar – benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya satu tahun.

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah (garis pemerataan sempurna) dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi (ekstrem ketimpangan sempurna).

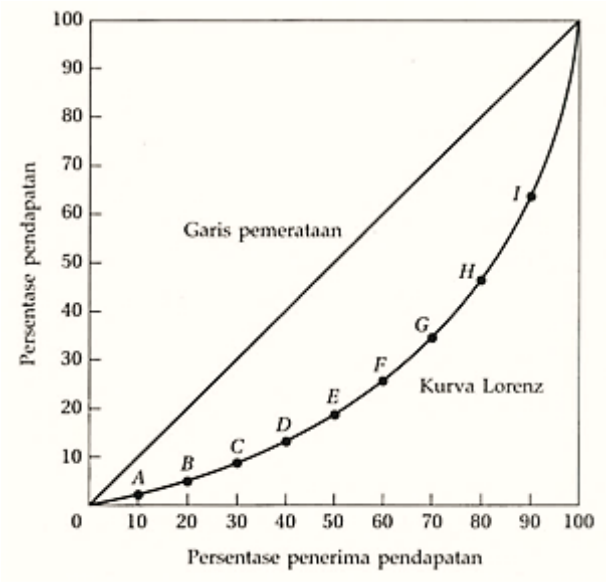

Gambar 2.2 Kurva Lorenz

2.1.2.2 *Gini Index/Gini Ratio*

Gini index adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut Gini setiap Kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka Gini dengan cara membagi bidang yang terletak di antara garis pemerataan sempurna dan kurva lorenz dengan bidang yang terletak di bagian kanan garis pemerataan dalam diagram Lorenz.

Semakin tinggi nilai koefisien semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sebaliknya semakin rendah nilai koefisien Gini semakin merata pula distribusi pendapatan. Maksimum dan minimum nilai G adalah : $0 \leq G \leq 1$ (Todaro & Smith, 2011).

2.1.3 Pengangguran

Pengangguran menurut Sukirno (2016) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Faktor lain yang menimbulkan pengangguran antara lain karena pengangguran ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri – industri. Dalam indikator sebuah ketimpangan ekonomi tingkat pengangguran menjadi salah satu faktor pembentuknya. Adapun makna dari tingkat pengangguran ialah rasio jumlah orang menganggur terhadap jumlah total orang dalam angkatan kerja (Fair, 2006).

Kaufman dan Hotchkiss (1999) mengemukakan pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara efektif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Arsono, 2014). Menurut sebab terjadinya, pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis (Sukirno, 2016) :

2.1.3.1 Pengangguran friksional atau pengangguran normal

Ketika perekonomian terus tumbuh dan mengalami perkembangan yang pesat maka jumlah dan tingkat pengangguran akan menjadi semakin rendah. Pada akhirnya perekonomian akan mampu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh yakni di bawah 4% dan pengangguran yang berlaku dinamakan pengangguran friksional atau pengangguran normal. Pengangguran ini bukanlah wujud dari ketidakmampuan mendapat pekerjaan, tetapi sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik.

Apabila perekonomian semakin membaik dan tingkat pengangguran semakin rendah, maka para pengusaha tentunya akan semakin kesulitan untuk melakukan penyerapan tenaga kerja guna meningkatkan produksi mereka. Keadaan seperti ini akan memicu para pekerja untuk menuntut gaji mereka.

Selain itu, akan didapati pula keadaan di mana segolongan tenaga kerja mulai meninggalkan pekerjaan lama mereka dan mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja tersebut mereka tentu akan menganggur sementara, dan sifat menganggur ini tidak serius.

2.1.3.2 Pengangguran struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian dan kegiatan perekonomian sebagai akibat dari perkembangan ekonomi. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya pengangguran struktural yaitu, (i) akibat dari kemerosotan permintaan, dan (ii) sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. Pengangguran yang diakibatkan oleh faktor ke dua atau karena kemajuan teknologi yang digunakan pengusaha akan menimbulkan pengangguran teknologi.

2.1.3.3 Pengangguran konjungtur

Pengangguran konjungtur merupakan pengangguran yang timbul oleh perubahan-perubahan kegiatan perekonomian. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, maka pengusaha akan mengurangi penggunaan mesin produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Sehingga kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang terus bertambah sebagai akibat dari pertambahan penduduk dengan tidak diikuti perkembangan perekonomian yang semakin membaik, maka pengangguran konjungtur akan bertambah serius.

2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketika seseorang sama sekali atau hampir tidak memiliki sumber jaminan. Orang – orang miskin tidak bisa memperoleh pinjaman untuk memulai usaha karena tidak sempurnanya pasar modal yang menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan subsisten atau pekerjaan berupah rendah, meskipun mereka dapat berbuat jauh lebih baik jika memiliki akses ke sumber pembiayaan atau jika terdapat distribusi pendapatan yang lebih adil (Todaro & Smith, 2011). Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antar kelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan (Kementrian PPN/Bappenas 2018).

Dalam menentukan kelompok penduduk miskin, standar minimum pengukuran kemiskinan disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu yang berfokus pada kelompok penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut besaran pendapatan/pengeluaran. Kelompok inilah yang didefinisikan sebagai kelompok relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada kondisi distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Sedangkan kemiskinan absolut adakalanya diukur berdasarkan jumlah atau hitungan perorangan dari orang – orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, atau disebut juga Indeks per kepala yaitu proporsi jumlah penduduk suatu negara yang hidup di bawah garis kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Namun sejak diperkenalkannya Indeks Kemiskinan Multidimensional kemisikinan tidak dapat diukur dengan tepat melalui pendapatan, seperti yang dijelaskan oleh Amartya Sen (Todaro & Smith, 2011) dalam kerangka kapabilitasnya. Untuk menerapkan gagasan tersebut UNDP pada tahun 2009 telah mengganti Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index – HPI)* dengan ukuran baru yaitu Indeks Kemiskinan Multidimensional (*Multidimensional Poverty Index – MPI)* dengan menyusun indeks yang didasarkan pada tingkat rumah tangga, MPI memperhitungkan adanya akibat interaksi negatif ketika orang – orang mengalami berbagai kekurangan kemiskinan yang lebih buruk, yang

dapat dilihat cukup dengan menjumlahkan kekurangan – kekurangan yang terjadi di suatu negara secara keseluruhan, menghitung rata – rata dan kemudian mengkombinasikannya. Adapun Indeks Kemiskinan Multidimensional adalah ukuran kemiskinan yang mengidentifikasi orang – orang miskin dengan menggunakan batas ganda bagi tingkat dan jumlah kekurangan, kemudian mengalihkan persentase orang – orang yang hidup dalam kemiskinan dengan persentase dari sejumlah indikator tertimbang untuk menentukan rata – rata kekurangan yang dialami rumah tangga yang miskin (Todaro & Smith, 2011).

Kemiskinan merupakan klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain, dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan (Chambers, 1983). Kondisi kurang menguntungkan tersebut meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri.

Rafl Dahrendorf menggunakan teori konflik dalam mengkaji masyarakat. Dahrendorf menyatakan bahwa kekuasaan dan wewenang menempatkan individu pada posisi atas dan bawah. Konflik terjadi karena salah satunnya disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia. Begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dapat menyebabkan manusia melakukan tindak kriminalitas. Akibat tidak terpenuhi suatu kebutuhan, manusia dapat melakukan tindak kriminalitas dalam berbagai bentuk, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik antar individu yang satu dengan yang lain. (Dulkiah and Nurjanah 2018).

2.1.5 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kejahatan

Teori Becker (Becker, 1968) menjelaskan bahwa faktor kesenjangan pendapatan menempatkan orang yang mendapatkan upah rendah dari sektor legal dengan orang yang memiliki harta berharga sangat tinggi pada suatu daerah. Hal tersebut akan meningkatkan *return* dari aksi kejahatan sehingga tingkat kejahatan akan tinggi di daerah tersebut.

Sedangkan Teori Strain berpendapat bahwa perasaan frustasi akan menghinggapi orang – orang yang tidak sukses ketika berhadapan dengan orang – orang sukses disektiarnya. Semakin besar kesenjangannya, akan semakin besar rasa frustasi

tersebut sehingga akan memperbesar godaan untuk melakukan tindak kejahatan. Freeman (1996) menemukan hubungan positif antara kejahatan dengan kesenjangan sosial, semakin tinggi kesenjangan sosial maka semakin besar kejahatan properti yang terjadi. Begitu juga dengan Ehrlich (1996) menemukan signifikansi distribusi pendapatan terhadap kejahatan dengan hubungan yang positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Chiu & Madden (1998) menyajikan model yang menelusuri hubungan yang potensial antara buruknya ketimpangan pendapatan dan meningkatnya jumlah pencurian, dan hasil terkuat menunjukkan bahwa peningkatan perbedaan ketimpangan secara relatif meningkatkan tingkat kriminalitas.

2.1.6 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kejahatan

Orang yang menganggur dan tidak berpenghasilan berarti tidak memiliki ekspektasi keuntungan dari pekerjaan legal. Karena itulah kecenderungan melakukan kejahatan orang yang menganggur lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja. Sehingga pengangguran secara teori memiliki hubungan positif dengan kejahatan properti atau pencurian.

Witte dan Tauchen (1993) menemukan bahwa kaum muda yang bekerja dengan upah atau pergi ke sekolah kecil kemungkinan untuk melakukan tindak kriminal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Melick, (2003) disebutkan bahwa secara historis terdapat dua pemikiran umum yang utama mengenai hubungan antara pengangguran dengan kejahatan. Pemikiran pertama berfokus pada "*supply of offenders*" dan pemikiran yang kedua berfokus pada "*supply of victims*". Salah satu gagasan dasarnya adalah individu dalam rangka untuk mempertahankan standar hidup. Maka selama dia menjadi pengangguran akan menjadi lebih mungkin untuk melakukan tindak pidana.

2.1.7 Pengaruh Garis Kemiskinan Terhadap Tingkat Kejahatan

Model teoritis yang dibangun oleh (Chiu and Madden, 1998) menemukan hubungan antara keadaan kemiskinan yang semakin memburuk atau dalam arti meningkatnya kemiskinan menimbulkan peningkatan kriminalitas utamanya pada tindakan perampokan, Mehanna (2004) meneliti bahwa garis kemiskinan berpengaruh positif terhadap peningkatan kriminalitas. Seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih berpotensi melakukan tindakan ilegal karena tidak mendapatkan perhatian dari orang normal yang melakukan tindakan legal.

Tindakan kriminalitas didominasi oleh penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi biaya hidupnya menurut Mehlum (2006). Penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Chor dan Md. Darit (2015) menujukkan bahwa adanya pengaruh secara positif dan signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, perihal adanya kemiskinan sangat mempengaruhi tindakan kejahatan. Faktanya individu yang berada di bawah tekanan hidup serba kekurangan atau dalam hal ini adalah orang miskin, mendorong untuk melakukan tindakan pencurian, sehingga garis kemiskinan yang meningkat atau tumbuh positif mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.

2.1.8 Pengaruh Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan

Permintaan kejahatan terbentuk karena adanya peluang dan kesempatan melakukan tindak kejahatan, sehingga faktor-faktor yang dapat menyebabkan bergesernya kurva permintaan adalah jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan, ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat dan tingkat keamanan.

Keseimbangan kejahatan terbentuk dari penawaran dan permintaan kejahatan. Penawaran kejahatan diperoleh dari pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan sedangkan permintaan kejahatan didapat dari permintaan masyarakat, kemudian pemerintah mempengaruhi keduanya (Becsi, 1999).

2.2 Tinjauan Empiris

No	Peneliti	Judul	Nama Jurnal	Metode	Hasil	Penelitian yang akan datang
1.	Randi Hjalmarsson dan Lance Lochner	*The Impact of Education On Crime : Internasional Evidence*	*CESifo DICE Report,* Volume 10, Page 49 – 55, 2012.	Variabel : Tingkat Kejahatan dan Pendidikan Alat analisis : *Ordinary Least Square*	Hasil : Secara empiris, meningkatnya tingkat pendidikan dapat menurunkan tindak kekerasan dan kejahatan properti secara signifikan	Dengan mengacu hasil penelitian ini, bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kejahatan dan untuk melengkapi penelitian ini sebaiknya penelitian yang akan datang dapat menambahkan analisis terhadap variabel sosial – ekonomi lainnya.
2.	Prawidya Hariani RS	Analisis Ketimpangan ekonomi dan pengaruhnya	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,	Variabel: Kriminalitas, PDRB, Gini Rasio	Hasil : Ketimpangan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat	Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator

		terhadap tingkat Kejahatan di propinsi sumatera utara	Volume 16, No 1, 2016	Alat analisis : analisis metode *Ordinary Least Square (OLS)*	Kriminalitas. Sehingga ketika ketimpangan ekonomi naik maka akan diikuti dengan peningkatan tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.	lain dari ketimpangan ekonomi bukan hanya gini rasio saja. Karena akan memberikan hasil yang lebih signifikan dari segi ketimpangan ekonomi.
3.	Davy Hendri	Kriminalitas : Sebuah sisi gelap dari ketimpangan distribusi pendapatan	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 5, No. 2, 2014	Variabel : Kriminalitas, distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Alat analisis : analisis tipologi klassen dan analisis indeks williamson	Hasil : ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini, memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap terjadinya kejahatan properti. Simpulan ini diperkuat oleh penggunaan sampel provinsi, *set* variabel tambahan yang menjelaskan tingkat	Penelitian selanjutnya disarankan melakukan estimasi dengan menggunakan data *selfreported* dan lebih mengeksplorasi beberapa variabel kebijakan pada level makro, seperti subsidi dalam konteks anggaran program anti kemiskinan, variabel *detterence effect*, rasio polisi per kapita, dan

					kejahatan (variabel kontrol), dan metode estimasi ekonometrika.	anggaran penegakan hukum serta keadilan.
4.	Rafida Khairani dan Yeni Ariesa	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)	Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 4, No. 2, 2019	Variabel : Tingkat Kriminalitas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, dan Pendapatan Perkapita Alat analisis : *Ordinary Least Square (OLS)*	Hasil : Berdasarkan hasil uji parsial bahwa secara individu tidak terdapat pengaruh masing-masing variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita terhadap tindakan kriminal di Sumatera Utara. Namun berdasarkan hasil uji simultan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh terhadap tindakan kriminal di Sumatera Utara.	Beberapa motif terjadinya kriminalitas di Sumatera Utara adalah krisis moralitas dengan maraknya penggunaan narkoba di kalangan anak remaja sehingga menghancurkan kualitas masa depan bangsa. Maka diperlukan penelitian lanjutan yang memasukkan variabel sosial masyarakat terhadap tingkat kriminalitas.

5.	Florentinus Nugro Hardianto	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia dari pendekatan ekonomi	Jurnal Bina Ekonomi, Volume 13, No. 2, 2009.	Variabel : Tingkat kemiskinan, jumlah tindak pidana, jumlah narapidana, Usia, Pengeluaran pembangunan sektor hukum Alat analisis : *Ordinary Least Square*	Hasil : Variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, variabel pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadaptingkat kriminalitas dan variabel probabilitas jumlah terdakwa/tertuduh yang dihukum penjara tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas.	Peneliti lain yang tertarik riset sejenis, penelitian yang hendak dilakukan sebaiknya menggunakan data runtun waktu atau menggunakan data yang lebih baru sehingga hasil risetnya nanti dapat menjadi bahan perbandingan dengan riset sebelumnya.

Dari informasi tabel tinjauan empiris diatas dapat kita simpulkan hal-hal yang menjadi kaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dengan menambahkan analisis terhadap variabel sosial-ekonomi lainnya menurut Lochner (2012) dan Khairani (2019) seperti menambahkan indikator lain dari ketimpangan ekonomi bukan hanya rasio gini saja menurut Prawidya (2016). Yakni dengan menambahkan variabel kebijakan pada level makro menurut Hendri (2014) seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, harapan lainnya adalah agar penelitian yang dilakukan menggunakan data runtun waktu atau menggunakan data yang lebih baru menurut Hardianto (2009). Penelitian ini merupakan gabungan ide-ide dari penelitian terdahulu yang disatukan dan diperbaharui baik dari tempat penelitian, waktu penelitian, dan variabel-variabel independent yang dipakai.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sullivan (2012) dalam meningkatkan utilitas seseorang melakukan kejahatan adalah keputusan yang rasional karena didasarkan atas maksimisasi utilitas pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan teori Maslow (1943) mengatakan dalam hierarki kebutuhan dasar manusia, rasa aman berada pada tingkatan kedua, sehingga permasalahan dari pembangunan ekonomi seperti ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan yang tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan gangguan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang menimbulkan permasalahan keamanan dengan munculnya tindak kejahatan pencurian dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi.

Berdasarkan teori Becker (Becker, 1968) menjelaskan bahwa faktor ketimpangan ekonomi menempatkan orang yang mendapatkan upah rendah dari sektor legal dengan orang yang memiliki harta berharga sangat tinggi pada suatu daerah. Hal tersebut akan meningkatkan *return* dari aksi kejahatan sehingga tingkat kejahatan akan tinggi di daerah tersebut.

Menurut Melick (2003) orang yang menganggur dan tidak berpenghasilan berarti tidak memiliki ekspektasi keuntungan dari pekerjaan legal. Karena itulah kecenderungan melakukan kejahatan orang yang menganggur lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja, sehingga pengangguran memiliki hubungan positif dengan kejahatan properti atau pencurian.

Tindakan kriminalitas didominasi oleh penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi biaya hidupnya menurut Mehlum (2006). Dan Mehanna (2004) meneliti bahwa seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih berpotensi melakukan tindakan ilegal karena tidak mendapatkan kesempatan berusaha dibandingkan dengan orang normal yang melakukan tindakan legal sehingga garis kemiskinan berpengaruh positif terhadap peningkatan kejahatan pencurian.

Menurut Ehrlich (1996) yang dapat menggeser kurva permintaan dari keseimbangan kejahatan diantarnya adalah tingkat penyelesaian tindak pidana pada suatu daerah, sehingga secara teori variabel penyelesaian tindak pidana memiliki hubungan negatif dengan tingkat kejahatan pencurian.

Berdasarkan uraian di atas secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

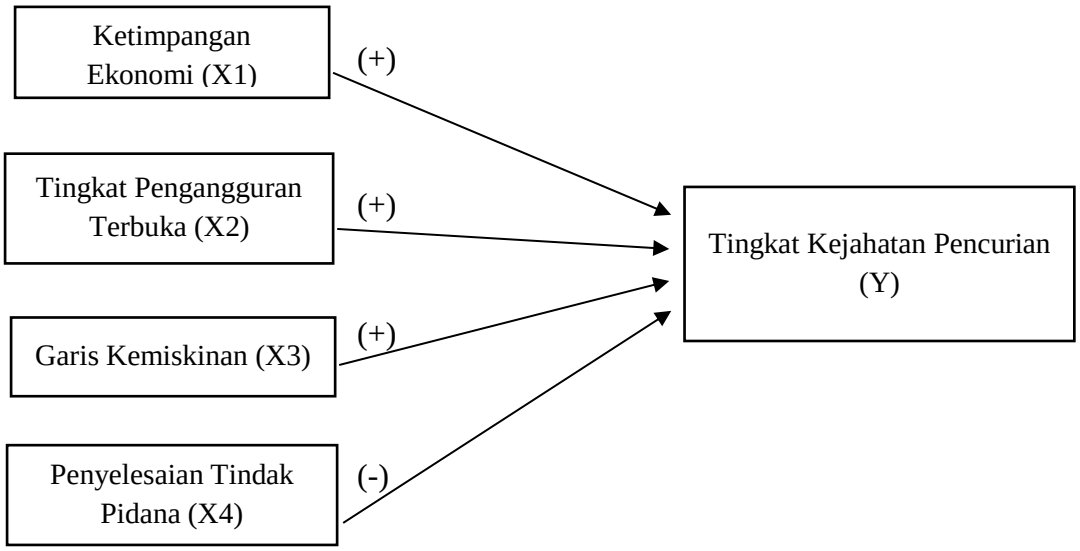

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Dari konsep kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Ketimpangan ekonomi diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.
2. Tingkat pengangguran terbuka diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.
3. Garis kemiskinan diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.
4. Penyelesaian tindak pidana diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010 – 2019.
5. Ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan variabel terikat *(dependent)* yaitu tingkat kejahatan pencurian di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan variabel bebas *(independent)* yaitu ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan garis kemiskinan. Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan yakni data sekunder, berupa *time series data* dan *cross section* yang disebut juga sebagai data panel.

Data *cross section* dalam penelitian ini merupakan data 10 provinsi di Pulau Sumatera dan data *time series* merupakan data dari 10 tahun terakhir yakni 2010 – 2019. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum dalam table berikut :

Tabel 3.1 Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Tingkat Kejahatan Pencurian	PNC	Jumlah Kasus	Badan Pusat Statistik
Ketimpangan Ekonomi	GINI	Persen (%)	Badan Pusat Statistik
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen (%)	Badan Pusat Statistik
Garis Kemiskinan	GK	Rp/kapita	Badan Pusat Statistik
Penyelesaian Tindak Pidana	PTP	Persen (%)	Badan Pusat Statistik

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitan

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, berikut penjelasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2.1 Tingkat Kejahatan Pencurian

Tingkat kejahatan pencurian ini sebagai variabel terikat yang diukur menggunakan data jumlah tindak kejahatan pencurian yang dilaporkan dengan satuan jumlah kasus. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

3.2.2 Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi ini sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di setiap Provinsi. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

3.2.4 Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan (GKM) yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (GKNM).

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis kemiskinan dalam penilitian ini diperolah dari penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan dalam bentuk satuan rupiah (Rp) per kapita. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

3.2.5 Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian tindak pidana ini merupakan data yang menunjukan banyak jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan di suatu daerah. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

3.3 Metode Analisis

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode Regresi Data Panel. Metode ini digunakan karena data panel merupakan gabungan dua jenis data yakni *time series data* dan *cross section data*

3.3.1 Regresi Data Panel

Pembentukan data panel yaitu dengan mengkombinasikan data times series dan cross section sehingga terbentuklah suatu kumpulan data. Data panel menggunakan simbol r untuk periode obeservasi atau tahunnya sedangkan i_t adalah simbol dari unit cross-section yang akan diobservasi. Data panel mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan data *time series* atau *cross section,* yaitu :

- Data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan mengahasilkan *degree of freedom* yang lebih besar (Widarjono, 2018).
- Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*ommited-variabel*) (Widarjono, 2018).

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$ = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

β_0 = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Slope

ε_{it} = Residual *(error term)*

Model Penelitian ini menggunakan persamaan data panel menguji pengaruh ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana terhadap tingkat kejahatan pencurian dibutuhkan spesifikasi model sebagai berikut:

$$logPNC_{it} = \beta_0 + \beta_1 GINI_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 logGK_{it} - \beta_4 PTP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

PNC_{it} = Tingkat Kejahatan Pencurian
$GINI_{it}$ = Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan
TPT_{it} = Tingkat pengangguran terbuka
GK_{it} = Garis kemiskinan
PTP_{it} = Penyelesaian Tindak Pidana
B_0 = Konstanta
$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien
i = Provinsi
ε = Residual (*error term)*
t = Waktu

Karena ditemukan pada pengujian asumsi klasik terdapat permasalahan dalam pengujian heteroskedastisitas dan normalitas maka dilakukan transformasi persamaan ke dalam bentuk persamaan logaritma atau dikenal sebagai model Log-log (log-linier) menurut Widarjono (2018).

Adapun alasan pemilihan model Log-log (log-linier) adalah sebagai berikut :

1. Menghindari adanya heteroskedastisitas
2. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
3. Mendekatkan skala data

Pemilihan model ini berdasarkan pada pengunaan model Log-log (log-linier). Damodar gujarati (2009) mengatakan bahwa salah satu keuntungan dari penggunaan log-linier adalah memperkecil bagi variabel-variabel yang diukur karena penggunaan logaritma dapat memperkecil salah satu penyimpangan dalam asumsi OLS *(Ordinary Least Square)* yaitu heteroskedastisitas karena transformasi yang menempatkan skala untuk pengukuran variabel, dan slop koefisien kemiringan β_1 elastisitas yaitu persentase perubahan dalam variabel X_i mengakibatkan perubahan dalam variabel Y.

3.4 Prosedur Analisis Data

3.4.1 Metode Estimasi Model

Dalam metode ini terdapat tiga macam metode pendekatan untuk pemilihan model terbaik diantaranya adalah sebagai berikut :

3.4.1.1 Metode *Common Effect*

Pendekatan ini merupakan teknik paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan menggunakan kombinasi data *time series* dan *cross section.* Tanpa melihat dari sisi perbedaan antar waktu dan individu (Widarjono, 2018). Di asumsikan bahwa data antar waktu dan individu sama. Spesifikasi model dari pendekatan ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

Y_{it}	= Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t
$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$	= Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t
β_0	= Intersep
$\beta_{1,2,3}$	= Koefisien Slope
μ_{it}	= Residual *(error term)*

3.4.1.2 Motede *Fixed Effect*

Teknik pendekatan ini mengestimasi data panel dengan asumsi adanya perbedaan intersep dalam data dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkapnya (Widarjono, 2018). Dimana variabel boneka (*dummy variable)* yang memilki nilai 0 untuk tidak terdapat pengaruh dan 1 untuk variabel yang memiliki pengaruh. Model estimasi ini sering kali disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variabels* (LSDV). Spesifikasi model dari pendekatan *fixed effect* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{2_{it}} + \beta_2 X_{2_{it}} + \beta_3 D_1 + \beta_4 D_2 + \beta_5 D_3 + \mu_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

X_{1it}, X_{2it} = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

β_0 = Intersep

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisiesn slope

D_1, D_2, D_3 = Variabel *dummy*

ε_{it} = Residual *(error term)*

3.4.1.3 Metode *Random Effect*

Teknik pendekatan ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu, hal ini disebabkan karena berkurangnya derajat kebebasanya *(degree of freedom)* yang dikarenakan penggunaan variabel *dummy* pada pendekatan *fixed effect* (Widarjono, 2018). Spesifikasi model ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \mu_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + (\varepsilon_{it} + \mu_i)$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + v_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$ = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

β_0 = Intersep

$\beta_{1,2}$ = Koefisien slope

v_{it} = $e_{it} + \mu_i$

3.4.2 Pemilihan Metode Regresi Data Panel

3.4.2.1 Uji Chow

Pengujian ini membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*. Untuk menetukan apakah metode *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel *dummy (common effect).* Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 10. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut (Widarjono, 2018) :

H_0 : *Model Common Effect*
H_a : *Model Fixed Effect*

H_0 ditolak jika F-tabel lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya H_0 diterima jika F-tabel lebih besar dari nilai α . Nilai F-tabel menggunakan α sebesar 5%. Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Menerima model *common effect*, jika nilai Uji Chow < F-tabel
H_a : Menerima model *fixed effect*, jika nilai Uji Chow > F-tabel

3.4.2.2 Uji Hausman

Pengujian ini membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect*. Uji Hausman menggunakan program yang serupa dengan Uji Chow yaitu program Eviews 10. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut (Widarjono, 2018) :

H_0 ditolak jika Chi Square lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya H_0 diterima jika *Chi Square* lebih besar dari nilai α . Nilai *Chi Square* menggunakan α sebesar 5%. Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Menerima model *random effect*, jika nilai Uji Hausman < nilai *Chi Square*
H_a : Menerima model *fixed effect*, jika nilai Uji Hausman > nilai *Chi Square*

3.4.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik dari pada model *common effect* untuk mengestimasi data panel. Dengan menggunakan program Eviews 10 untuk melakukan pengujian lagrange multiplier (LM). Hipotesis yang dibentuk dalam Uji LM adalah sebagai berikut (Widarjono, 2018) :

H_0 = Model *Common Effect*
H_a = Model *Random Effect*

H_0 ditolak apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih kecil dari α 5%, maka model terbaik yang dipilih adalah *random effect.* Namun sebaliknya H_0 diterima apabila nilai probabilitas lebih besar dari α 5%, maka model terbaik yang dipilih adalah *common effect.*

3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Yang terdiri dari Asumsi Normalitas, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Autokorelasi. Oleh karena itu, uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut :

3.4.3.1 Uji Asumsi Normalitas

Model uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mutlak regresi yang baik. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data residualnya. Uji ini untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variable independen dan dependen apakah mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, kita dapat menguji dengan menggunakan uji Jarque bera dan t-statistik. Berikut hipotesisnya :

H_0 : Residu tersebar normal

H_a : Tersebar tidak normal

Kriteria pengujiannya adalah :

H_o ditolak dan H_a diterima, jika P *value* < P tabel

H_o diterima dan H_a ditolak, jika P *value* > P tabel.

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan banyak cara seperti yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya masalah heterokedastisitas yaitu menggunakan uji Glesjer. Asumsi yang digunakan dalam heterokedastisitas adalah (Gujarati, 2009) :

H0 : tidak ada heteroskedastisitas

(Obs*R-Square hitung < Obs*R-Square tabel)

Ha : ada heteroskedastisitas

(Obs*R-Square hitung > Obs*R-Square tabel)

3.4.3.3 Uji Asumsi Multikolineritas

Deteksi multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk melihat adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat di dalam suatu penelitian (Gujarati, 2009). Indikasi awalnya adalah dengan standard error yang tinggi sementara nilai t statistiknya rendah.

Model yang terdapat multikolinearitas pada datanya akan cenderung menyesatkan karena estimasi variabelnya tidak tepat. Akibat lebih lanjut model tidak dapat digunakan untuk peramalan. Pada penelitian ini untuk mendeteksi multikolinieritas menggunakan pengujian *Pearson Correlation.* Dengan kriterianya adalah jika nilai koefisien antar variabelnya melebihi 0,8 maka bisa dikatakan terjadi koefisien korelasi antar variabel dalam model (Gujarati, 2006).

3.4.3.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama yang lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat di uji melalui uji Durbin-Watson untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson *statistic* terletak -2 sampai dengan +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5%. Berikut hipotesisnya :

H_0 : Tidak ada Autokorelasi
H_a : Ada Autokorelasi

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengaruh ini dapat dillihat dari probabilitasnya terhadap α dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05 dan derajat kebebasan (*df*). Pengujian ini berdasarkan pada nilai positif dan negatif.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:
H_0ditolak dan $H_a$diterima, jika t-hitung > t-tabel
H_0diterima dan $H_a$ditolak, jika t-hitung <t-tabel

Apabila t-statistik lebih besar dari pada t-tabel dan probabilitasnya lebih kecil dari 0,05%, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila t-statistik lebih kecil dari pada t-tabel dan probabilitasnya lebih besar dari 0,05% maka H_0 diterima.
Langkah langkah dalam pengujian signifikansi parameter individual (Uji t) adalah (Widarjono, 2018) :

1. Hipotesis variabel Ketimpangan Ekonomi

   H_{01} : $ß_1 \leq 0$ → ketimpangan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

   Ha_1 : $ß_1 > 0$ → ketimpangan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

2. Hipotesis variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

   H_{02} : $ß_2 \leq 0$ → tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

   Ha_2 : $ß_2 > 0$ → tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

3. Hipotesis variabel Garis Kemiskinan

   H_{03} : $ß_3 \leq 0$ → garis kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

   Ha_3 : $ß_3 > 0$ → garis kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

4. Hipotesis variabel Penyelesaian Tindak Pidana

   H_{04} : $ß_4 \geq 0$ → penyelesaian tindak pidana berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

   Ha_4 : $ß_4 < 0$ → penyelesaian tindak pidana berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Tahapan dalam melakukan pengujian ini hampir sama dengan pengujian dalam Uji t, yaitu sebagai berikut (Gujarati 2009):

1. Tentukan hipotesisnya terlebih dahulu

   H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

   H_1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, setidaknya 1 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

   Bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel untuk mengambil keputusan akan menolak atau menerima H_0 (Gujarati, 2011), dengan :

   a. Jika $F_{obs} > F_{tabel}$ atau signifikansi F kurang dari $\alpha = 0{,}05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu tingkat kejahatan pencurian.
   a. Jika $F_{obs} < F_{tabel}$ atau signifikansi F lebih dari $\alpha = 0{,}05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu tingkat kejahatan pencurian.

3.4.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji yang menunjukkan besarnya daya kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat pada model. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang akan diambil adalah (Widarjono, 2018) :

1. Nilai R^2 mendekati nol artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas.
2. Nilai R^2 mendekati satu artinya kemampuan variabel bebas memberikan semua informasi untuk memprediksi variasi variabel terikat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor pertumbuhan ekonomi yakni ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana atas pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera periode 2010-2019. Adapun simpulan yang didapatkan sebagai berikut :

5.1.1 Ketimpangan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

5.1.2 Garis kemiskinan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

5.1.3 Penyelesaian tindak pidana berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

5.1.4 Ketimpangan ekonomi, pengangguran terbuka dan garis kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2010-2019.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Ketimpangan ekonomi merupakan variabel yang memiliki implikasi paling besar dan siginifikan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Menurut Todaro dan Smith (2011) distribusi pendapatan perorangan adalah ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom untuk mengukur ketimpangan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera sebaiknya merealisasikan indikator ke-sepuluh SDGs (*Sustainable Development Goals)* yakni mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara melalui kebijakan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% secara progresif mencapai dan dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Hal ini agar pemerataan pendapatan dan jumlah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan minimumnya bisa ditingkatkan, sehingga ketimpangan ekonomi dan garis kemiskinan dapat dikendalikan dan menurunkan tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera.

5.2.2 Penelitian ini menggunakan data persentase pengangguran terbuka secara umum untuk mengatahui pengaruhnya terhadap jumlah kejahatan pencurian. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data pengangguran yang lebih spesifik untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap jumlah kejahatan pencurian, serta menambahkan variabel tingkat pendidikan dan kelompok umur penduduk untuk memperoleh hasil yang lebih kuat.

5.2.3 Pada penelitan selanjutnya apabila ingin menggunakan variabel garis kemiskinan diharapkan dapat melakukan estimasi dengan menggunakan sampel data kemiskinan yang lebih spesifik agar diperoleh hasil yang lebih akurat, karena garis kemiskinan belum menggambarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Arsono, yudho dito. (2014). "*Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, Dan Jumlah Polisi Perkapita Terhadap Angka Kejahatan Properti Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012*." skripsi. Universitas Diponegoro

Becker, gary s. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach.* The American Journal of Surgery

Becsi, Zsolt. (1999). "*Economics and Crime in the States.*"

Badan Pusat Statistik. (2011-2019). *Statistik Kriminal Indonesia*. 2019. Jakarta: BPS.

Chiricos, Theodore G. (1987). "*Rates of Crime and Unemployment: An Analysis of Aggregate Research Evidence.*" Social Problems 34(2): 187–212.

Chiu, W. Henry, and Paul Madden. (1998). "*Burglary and Income Inequality."* Journal of Public Economics 69(1): 123–41.

Chor, Foon Tang, and Sezali Md. Darit. (2015). *"Penentu Makroekonomi Kadar Jenayah Di Malaysia."* Jurnal Ekonomi Malaysia 49(2): 53–60.

Dulkiah, Moh., and Nurjanah. (2018). *"Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung."* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8(2): 57.

Ehrlich, Isaac. (1996). *"Crime, Punishment, and the Market for Offenses."* Journal of Economic Perspectives 10(1): 43–67.

Fair, Karl E. Case Ray C. (2006). *Prinsip - Prinsip Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Gujarati, Damodar N. (2009). *Basic Econometrics*. Fourth Edi. The McGraw-Hill Companies.

Hardianto, Florentinus. (2009). *"Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi"*. Jurnal Bina Eknomi

Hendri, D. (2014). *Kriminalitas : Sebuah Sisi Gelap dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Crime : A Dark Side of Income Inequality)*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik

Hariani, Prawidya. (2016). *"Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Provinsi Sumatera Utara"*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Ilham, Muhammd. (2015). *"Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011 - 2015."*

Kartono, Kartini. (2008). *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementrian PPN/Bappenas. (2018). *"Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi."* Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan: 1–80.

Khairani, R., & Ariesa, Y. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2013) *"Pasal 362-367 Bab XXII Pencurian"*. Bandung: Citra Umbara.

Lederman, Daniel, Pablo Fajnzylber, and Norman Loayza. (2002). *"Inequality and Violent Crime."* Journal of Law and Economics 45(1 I): 1–40.

Lochner, R. H. L. (2012). *The Impact of Education on Crime: International Evidence*. CSEifo DICE

Machin, S., & Meghir, C. (2000). *crime and economic incentives*.

Mehanna, Rock-Antoine. (2004). *"Poverty and Economic Development: Not as Direct as It May Seem."* Journal of Socio-Economics 33: 217–28.

Mehlum, Halvor, Edward Miguel, and Ragnar Torvik. (2006). *"Poverty and Crime in 19th Century Germany."* Journal of Urban Economics 59(3): 370–88.

Melick, Matthew. (2003). *"The Relationship between Crime and Unemployment."* The Park Place Economist 11(1): 30–36.

Priatna, Yogie Yedia.(2016). *"Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015"*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). "*Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur"*. Jurnal Ekonomi-QU.

Sukirno, Sadono. (2016). "*Makroekonomi: teori pengantar."* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Syahputri, P. H. R. dan A. R. (2013). "*Analisis ketimpangan ekonomi dan pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas di propinsi sumatera utara."*

Sullivan, Arthur. (2012). *"Urban Economics"*. United States of America : McGraw-Hill.

Todaro, Michael P., and Stephen c. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Widarjono, Agus. (2018). *Ekonometrika*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Witte, Ann D., and Helen Tauchen. (1993). "*Work and Crime: An Exploration Using Panel Data.*" The Economic Dimensions of Crime: 176–91.